KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat-Nya, Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ini dapat kami susun dan sajikan.

Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah tahun 2027 ini kami susun sebagai bahan untuk pelaksanaan harmonisasi peraturan perundangan sebagai persyaratan awal pembentukan produk hukum.

Atas tersusunnya Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah tahun 2027, kami sampaikan terima kasih kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, atas arahannya dalam perbaikan penulisan dokumen Kajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang seharusnya.

Kajen, 7 Juli 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PEKALONGAN

TRISNO SUHARSANTO, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730710 199803 1 007

DAFTAR ISi

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah 4

C. Tujuan Penyusunan 5

D. Dasar Hukum 6

BAB II POKOK PIKIRAN 8

BAB III MATERI MUATAN 10

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 10

B. Identifikasi Masalah 11

BAB IV PENUTUP 12

A. Simpulan 12

B. Saran 12

DAFTAR PUSTAKA 13

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Renja Perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun oleh masing-masing instansi pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat kebijakan, program, kegiatan, subkegiatan, target indikator kinerja, serta rincian pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap instansi. Dokumen renja merupakan penjabaran dari Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten berkaitan dengan kedudukan, peran, dan fungsi dokumen Renja Perangkat Daerah yang sangat strategis dalam penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing perangkat daerah sebagai berikut.

1. Renja Perangkat Daerah memuat indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun sehingga perlu disahkan sebagai peraturan hukum yang mengikat setiap Perangkat Daerah.
2. Perlu adanya arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
3. Perlu adanya rumusan tolak ukur yang sah untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan kajian Raperbup Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengeloloaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegunaan penyusunan kajian Raperbup Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai acuan atau referensi perlunya penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dan pengesahannya.

D. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepurtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040
q. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Peraturan yang erat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyebutkan :
   a. Pasal 7 ayat (2): Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
   b. Pasal 21 ayat (3): Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepadarancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4)
   c. Pasal 21 ayat (3): Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
2) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 142 ayat (1): BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada

3) Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 22 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan rencana kerja pemerintah Daerah.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Renja Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep. Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat

Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

B. Ruang Lingkup Materi

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 meliputi:

1. Pasal 1
   Menguraikan pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Renja Perangkat Dearah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.
2. Pasal 2
   Menguraikan pengertian RKPD sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran
3. Pasal 3
   Berisi tentang penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya dan hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun berjalan.
4. Pasal 4
   Penjelasan tentang sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah.
5. Pasal 5
   Berisi tentang dokumen Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman penyusunan RKA Perangkat Daerah
6. Pasal 6
   Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati tentang Reja Perangkat Daerah
   .

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 sebagaimana terlampir.

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

a. Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 menjadi kewajiban tahunan Daerah untuk ditetapkan.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 menjadi dasar dalam penyusunan program kegiatan dan anggaran semua Perangkat Daerah untuk Tahun 2027.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027. Penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

..... (2004) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

..... (2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

..... (2017) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta.

..... (2005) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Kajen.

.... (2025) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 22 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Peerangkat Daerah Tahun 2025-2029, Kajen.